

## PENGEMBANGAN KEGIATAN EKONOMI BERBASIS BLUE ECONOMY DI KAWASAN PESISIR KEK MANDALIKA

Gina Sonya Adriadi<sup>1</sup>, Mansur Afifi<sup>2</sup>, Baiq Saripta W. M<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Jl. Majapahit No. 62 Mataram

[ginaadriadi99@gmail.com](mailto:ginaadriadi99@gmail.com), [mansurafifi@yahoo.de](mailto:mansurafifi@yahoo.de), [bqsaripta@gmail.com](mailto:bqsaripta@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian berjudul “Pengembangan Kegiatan Ekonomi Berbasis Blue Economy di Kawasan Pesisir KEK Mandalika”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui Pengembangan Kegiatan Ekonomi Berbasis Blue Economy di Kawasan Pesisir KEK Mandalika serta untuk mengetahui pengembangan apa saja yang telah dilakukan pemerintah khususnya dalam bidang pariwisata dan perikanan, serta untuk mengetahui dampak ekonomi, sosial dan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara terbuka dan mendalam, observasi lapangan dan hasil dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian Pengembangan Kegiatan Ekonomi Berbasis Blue Economy di Kawasan Pesisir KEK Mandalika. Pengembangan ekonomi yang dilakukan pemerintah terutama pada sektor kepariwisataan dilakukan dalam berbagai kegiatan seperti pembangunan proyek sirkuit, jalan tol, hotel dan penginapan sebagai akses penunjang KEK Mandalika serta pemberdayaan masyarakat dan para pemilik usaha. Dalam proses pembangunan proyek pemerintah tersebut memberikan dampak pada masyarakat sekitar, khususnya dalam mengurangi angka pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas peluang tenaga usaha dan kerja, selain itu mendorong peningkatan dan pertumbuhan dibidang pembangunan sektor lain. Namun, pada aspek lingkungan proses pembangunan infrastruktur dan proyek yang dibangun, masyarakat merasa dirugikan dikarenakan kurang optimalnya pola antisipasi dan pengendalian lingkungan. Kata Kunci: pembangunan ekonomi, berkelanjutan, masyarakat pesisir, blue economy, pariwisata

### 1. PENDAHULUAN

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki ribuan pulau dengan laut yang luas sehingga sangat memungkinkan untuk memiliki potensi wisata alam yang banyak dan beragam. Salah satu jenis pariwisata tersebut adalah wisata bahari dan pesisir. Persoalan kemudian timbul, ketika terjadi ketidakmampuan dan kesenjangan kualitas dalam proses mengidentifikasi, merencanakan, mengelola, mengawasi, mengoptimalkan, dan menjaga keberlanjutan potensi daerah kepulauan tersebut. Berkaitan dengan pengelolaan kelautan melalui pendekatan ekosistem kemudian dikenal istilah *Blue Economy*, yang berlandaskan pada integrasi tiga pilar, yaitu pilar ekosistem, ekonomi dan sosial. Pada tahun 2010, Gunter Pauli mengedepankan konsep “Ekonomi Biru” dalam bukunya “*The Blue Economy*”. Hal inilah yang menjadi salah satu

penyebab berkembangnya peralihan dari darat ke laut, juga karena mengingat potensi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, konsep *Green Economy* saja tidak cukup dibarengi dengan *Blue Economy*. Penerapan konsep pembangunan kelautan yang berbasis *Blue Economy* merupakan langkah strategis dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan. Konsepsi BE bertujuan untuk menciptakan suatu industri yang ramah lingkungan, sehingga bisa tercipta pengelolaan sumberdaya alam yang lestari dan berkelanjutan (KKP, 2014). Pengembangan konsep BE sangat sesuai dengan konsepsi *blue growth* FAO yaitu pendekatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, terintegrasi, dan dapat meningkatkan sosial ekonomi masyarakat.

Menurut UU No. Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, pariwisata adalah berbagai kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah. Kegiatan perikanan dan pariwisata dapat diintegrasikan ke dalam bentuk pariwisata. Menurut Dermawan dan Azis (2012); Hakim (2013), pariwisata secara terminologi diartikan sebagai pendekatan pengelolaan berbasis konservasi yang terintegrasi dengan fokus pada pengembangan pariwisata perikanan dan bahari. Pariwisata bahari dan pesisir sebagai salah satu segmen terbesar dari sektor ekonomi maritim, serta komponen terbesar dalam industri pariwisata, seringkali menimbulkan kontroversi mengenai dampak lingkungan dan kesesuaian dengan aktivitas manusia lainnya. Penerapan konsep ekonomi dan pariwisata yang berorientasi pada pelestarian lingkungan dan sumber daya alam merupakan salah satu pilihan untuk mengatasi masalah tersebut. Konsep Ekonomi Biru menawarkan konsep ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekosistem, dimana pembangunan tidak hanya akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga menjamin keberlanjutan ekologi dan sosial. Selain itu, konsep ekowisata juga menawarkan kegiatan wisata yang mengutamakan aspek pelestarian alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia sendiri, terdapat tiga lokasi pencontohan penerapan Blue Economy yaitu, Nusa Penida, Bali, Lombok Tengah dan Lombok Timur (KKP, 2014). Lombok Tengah merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi laut dan menerapkan konsep ekonomi biru terutama pada kawasan ekonomi khusus Mandalika. Kuta Mandalika merupakan salah satu kawasan yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah dalam pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk menerapkan konsep ekonomi biru, dan pariwisata merupakan salah satu dari sembilan rencana utama konsep ekonomi biru. *The Lombok Blue Economy Implementation Program* merupakan kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) dan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO).

Namun dengan berkembangnya wisata bahari dan pesisir serta proyek-proyek unggulan juga menimbulkan permasalahan kerusakan lingkungan, akibat pembangunan gedung dan kegiatan pariwisata serta semakin terkikisnya bukit-bukit yang dikhawatirkan bisa menimbulkan longsor. Sehingga perlu ditemukan langkah pemecahan masalah untuk mendukung pariwisata berkelanjutan serta potensi kelautan dan perikananannya yang bisa menjadi penunjang kesejahteraan masyarakat sekitar.

Masalah lainnya juga timbul ketika pembangunan sektor penunjang yang merupakan program dari pemerintah menimbulkan banyak konflik sosial di masyarakat, seperti tergesernya masyarakat pesisir oleh pihak swasta yang cenderung menjadi penonton

diwilayah sendiri. Maka dari itu, perlu adanya upaya *Upgrading* dari pemerintah atau meningkatkan daya saing ekonomi bagi masyarakat pesisir dalam mengoptimalkan potensi wilayahnya secara berkelanjutan dengan mengikut sertakan masyarakat sekitar dalam hal pembangunan proyek-proyek pemerintah yang sedang digalakkan. *Blue Economy* merupakan instrument yang dapat digunakan untuk memperbaiki pola ekonomi dan menciptakan aktivitas yang bersifat jangka panjang atau berkelanjutan dengan bekerjasama dalam pengembangan antara *stakeholder* dan masyarakat di wilayah pesisir dengan memperhatikan sistem Ekologi. Hasil penelitian Mira, Maulana Firdaus, dan Elly Reswati yang berjudul “Penerapan Prinsip Blue Economy di Wilayah Brebes Jawa Tengah” Terdapat tiga usaha perikanan dan kelautan pada masyarakat pesisir di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah yang telah menerapkan prinsip-prinsip blue economy seperti pada usaha longyam, polikultur, dan usaha pengolahan kulit ikan menjadi kerupuk. Kendala dalam penerapan sistem usaha terpadu antara peternakan ayam dan usaha perikanan di desa Kaliwlingi adalah sistem usaha ini tidak dilakukan dengan massal pada suatu wilayah, hanya beberapa RTP saja. Hasil penelitian Rendi Prayuda Dian Venita Sary yang berjudul “Strategi Indonesia dalam Implementasi Konsep Blue Economy Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di era MEA” menunjukkan bahwa Pemerintah dinilai kurang dalam mengupayakan pengoptimalisasi potensi khususnya di wilayah pesisir, selain itu, sosialisasi pemerintah terkait MEA belum terealisasi secara optimal, lantas banyak masyarakat yang masih belum mengetahui mengenai MEA beserta tantangan dan potensinya. Kedua, masyarakat dinilai cenderung pasif, padahal untuk mewujudkan produktivitas dalam usaha kelautan guna mendorong Indonesia sebagai poros maritim dunia, masyarakat pesisir merupakan faktor sentral utama. Maka, dengan aplikasi konsep Blue Economy yang menyatu dengan konsep digitalisasi industri akuakultur akan memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan lagi potensi wilayah nasional sehingga diharapkan menjadi basis utama untuk meningkatkan ketahanan pangan serta pertumbuhan ekonomi yang mampu memberikan porsi besar dalam kemandirian dan pemberdayaan masyarakat secara komprehensif.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

### **Konsep Blue Economy**

Konsep ekonomi biru pertama kali dikenalkan oleh Gunter Paulli dengan meninjau kekurangan konsep ekonomi hijau, salah satu diantaranya yaitu masalah makanan organik yang membutuhkan biaya besar untuk mendapatkannya karena makanan organik tersebut tidak diproduksi diseluruh penjuru negeri. Gunter Paulli melalui konsep *Blue Economy* mencoba menawarkan solusi untuk menjawab tantangan bahwa sistem ekonomi dunia cenderung eksploitatif dan secara nyata telah merusak lingkungan. Ekonomi biru meliputi banyak kegiatan, termasuk perikanan, pariwisata, transportasi maritim, energi terbarukan, perubahan iklim, dan penanganan limbah.

### **Prinsip Penerapan Blue Economy**

Prinsip yang diterapkan pada pembangunan sektor kelautan dan perikanan dengan konsep *blue economy* antara lain:

- Pertama, terintegrasi antara ekonomi dan lingkungan, jenis investasi dan sistem produksi, kebijakan pusat, daerah, dan lintas sektor.

- Kedua, berbasis kawasan. Yakni kawasan ekonomi potensial dan lintas batas ekosistem, wilayah administratif, dan lintas sektor.
- Ketiga, sistem produksi bersih, efisien tanpa limbah, bebas pencemaran, dan tidak merusak lingkungan.
- Keempat, investasi kreatif dan inovatif, yakni penanaman modal dan bisnis dengan model *blue economy*. Selanjutnya, berkelanjutan. Seimbang antara pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan pelestarian lingkungan.

#### **Wisata bahari dan Pesisir**

Menurut Sarwono dalam Gautama (2011), wisata bahari adalah kegiatan yang memanfaatkan potensi alam bahari sebagai daya tarik wisata maupun wadah kegiatan wisata yang dilakukan diatas maupun di bawah permukaan di wilayah laut yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan ekosistemnya yang kaya akan keanekaragaman jenis biota laut.

#### **Penelitian Terdahulu**

Hasil penelitian Mira, Maulana Firdaus, dan Elly Reswati yang berjudul “Penerapan Prinsip Blue Economy di Wilayah Brebes Jawa Tengah” Terdapat tiga usaha perikanan dan kelautan pada masyarakat pesisir di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah yang telah menerapkan prinsip-prinsip *blue economy* seperti pada usaha longyam, polikultur, dan usaha pengolahan kulit ikan menjadi kerupuk. Kendala dalam penerapan sistem usaha terpadu antara peternakan ayam dan usaha perikanan di desa Kaliwlingi adalah sistem usaha ini tidak dilakukan dengan massal pada suatu wilayah, hanya beberapa RTP saja. Hasil penelitian Rendi Prayuda Dian Venita Sary yang berjudul “Strategi Indonesia dalam Implementasi Konsep Blue Economy Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di era MEA” menunjukkan bahwa Pemerintah dinilai kurang dalam mengupayakan pengoptimalisasi potensi khususnya di wilayah pesisir, selain itu, sosialisasi pemerintah terkait MEA belum terealisasi secara optimal, lantas banyak masyarakat yang masih belum mengetahui mengenai MEA beserta tantangan dan potensinya. Kedua, masyarakat dinilai cenderung pasif, padahal untuk mewujudkan produktivitas dalam usaha kelautan guna mendorong Indonesia sebagai poros maritim dunia, masyarakat pesisir merupakan faktor sentral utama.

Maka, dengan aplikasi konsep *Blue Economy* yang menyatu dengan konsep digitalisasi industri akuakultur akan memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan lagi potensi wilayah nasional sehingga diharapkan menjadi basis utama untuk meningkatkan ketahanan pangan serta pertumbuhan ekonomi yang mampu memberikan porsi besar dalam kemandirian dan pemberdayaan masyarakat secara komprehensif.

### **3. METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis data secara deskriptif dengan tujuan untuk menyederhanakan data kedalam bentuk yang mudah dipahami (Singarimbun. 1989).

Pengumpulan data menggunakan informan dan kehadiran peneliti. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini berlokasi di daerah pesisir KEK Mandalika dan salah satu desa penunjang KEK Mandalika yaitu desa Mertak kecamatan Pujut . Analisis data menggunakan pengumpulan data,

penyajian data, reduksi data, dan menarik kesimpulan. Jenis data adalah data primer dan data sekunder.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 5.

#### **Pengembangan kegiatan ekonomi ditinjau dari konsep Blue Economy di kawasan pesisir KEK Mandalika**

##### 1. Kegiatan masyarakat di bidang pariwisata

Dalam membentuk SDM yang berkualitas di bidang pariwisata, Provinsi NTB memiliki sejumlah lembaga pendidikan untuk mendidik dan menyiapkan tenaga kerja terampil di bidang pariwisata mulai dari SMK, BKL hingga Poltekpar Lombok. Di sejumlah lembaga pendidikan tersebut memang tidak semua diisi oleh masyarakat lokal, banyak masyarakat dari luar yang sedang belajar dan mengembangkan diri. Salah satu kegiatan dalam rangka pembentukan SDM yaitu diadakannya Pelatihan Kompetensi Dasar Karyawan Front Line Hotel Non Bintang Kawasan Penyangga Kuta Mandalika dari Asosiasi Hotel bersama kampus Politeknik Pariwisata. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi semangat dan confident kepada para karyawan untuk mampu menjawab tantangan-tantangan ke depan, khususnya di Mandalika.

Selain itu, pihak pengelola ITDC juga meningkatkan kapasitas dan kapabilitas para pelaku usaha, seperti di dirikannya sebuah asosiasi bagi para pemilik hotel dan homestay, yaitu MHA (Mandalika Hotel Association) dan Asosiasi Homestay yang sebelumnya berada dibawah PHRI. Selain itu, pihak ITDC juga rutin mengadakan kegiatan pelatihan kepada para pemuda pemudi yang berasal dari desa penunjang, seperti pelatihan budidaya jamur dan pelatihan serta pendampingan kewirausahaan. Total peserta yang mengikuti pelatihan ini adalah sekitar 48 orang pria dan wanita baik kalangan pemuda maupun orang tua dari 6 desa penyangga KEK Mandalika. Saat ini peserta pelatihan budidaya jamur tiram dari beberapa desa sudah bisa menerima permintaan untuk suplai jamur tiram dari restoran maupun diperjual belikan kepada masyarakat secara langsung. Inilah yang bisa menjadi pemicu peningkatan taraf kehidupan masyarakat di desa penyangga KEK Mandalika. Program-program tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan terciptanya dan tersedianya lapangan usaha yang sesuai dengan kompetensi dan harapan komunitas dengan modal pengetahuan, keterampilan dan sarana atau prasarana. Dengan adanya program tersebut, maka akan menciptakan nilai ekonomi bagi keluarga dan kelompoknya serta adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan terkait dengan produk dari usaha UMKM sehingga dapat berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Dalam aspek pendukung pariwisata, terdapat homestay yang dikelola oleh warga masyarakat sekitar objek wisata dan ada bantuan yang berasal dari pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua asosiasi homestay Lalu Maulidin, menyampaikan bahwa ada sebuah program yang dilakukan pihak ITDC dengan homestay lokal, yang mana program ini melibatkan masyarakat sekitar yang digerakkan dengan memanfaatkan property yang dimiliki masyarakat menjadi Homestay yang mewakili kegiatan UMKM disaat event berlangsung dan bisa menjadi homestay yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Saat ini ada 138 homestay, ditambah dengan bantuan perumahan homestay untuk desa penunjang yang

diinisiatifi oleh PUPR berjumlah 200 hunian bagi masyarakat dari desa penunjang KEK.

## 2. Kegiatan masyarakat di bidang perikanan

Adapun sentra perikanan yang dikembangkan saat ini dipusatkan di wilayah desa Mertak, khususnya teluk awang yang merupakan bagian dari desa penyangga KEK dan merupakan kawasan minapolitan sebagai pusat industri perikanan tangkap lepas pantai, yang terletak di perairan Teluk Awang dan secara alami terlindung dari gelombang yang datang dari Samudera Hindia, keberadaan teluk awang sebagai kawasan minapolitan sangat potensial, mengingat kawasan ini bisa menangkap ratusan ton ikan. Namun, untuk menjadikan teluk awang sebagai sentra ekspor perikanan perlu dilengkapi sarana dan prasarana penunjang seperti air bersih, dan pabrik es. Sedangkan untuk perkumpulan nelayan sendiri, di dua desa ini masih belum terbentuk, yang terbentuk hanyalah kelompok- kelompok kecil di setiap pesisir dan terbentuk melalui sebuah komunitas. Seperti komunitas nelayan, budidaya rumput laut, dan tambak udang di wilayah tertentu. Yang ada hanya GAPOKTAN (gabungan kelompok tani) di desa Mertak.

Dalam pembagian zonasi ini, terdapat wilayah yang merupakan binaan dari pihak ITDC, yaitu 8 dusun di zona barat. Pemerintah desa dalam hal pemberdayaan masyarakatnya di bantu ITDC melakukan pembinaan dan pelatihan bagi para pemuda melalui POKDARWIS yang kemudian di tempatkan disetiap obyek-obyek wisata naungan ITDC. Sedangkan Zona tengah dikelola pemerintah desa bersama dengan perusahaan korea dalam mengembangkan TWA gunung Tunak. Sedangkan pada zona timur lebih dominan ke perikanan, budidaya rumput laut namun masih dalam skala kecil, dan tambak udang Jadi dengan berkembangnya pembangunan yang ada di sekitar KEK Mandalika juga dapat memberikan pengaruh tersendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki setiap wilayah desa penunjang.

### **Dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan ekonomi berbasis Blue Economy terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat KEK Mandalika kecamatan Pujut.**

Dalam suatu pengembangan kawasan wisata, akan terjadi masalah-masalah yang mungkin akan dihadapi pemerintah dan masyarakat. Permasalahan tersebut muncul dari multi sektor, seperti ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Namun demikian, dampak positif yang akan muncul antara lain: **pertama**, membuka lapangan kerja. **Kedua**, meningkatkan pendapatan daerah dan negara. Dengan adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang semakin dikenal, maka kunjungan wisatawan akan semakin meningkat dan berdampak pada naiknya pendapatan daerah pada khususnya, dan negara pada umumnya. **Ketiga**, transfer teknologi. Adanya kawasan pariwisata seperti di Mandalika akan membentuk masyarakat yang pada awalnya belum mengenal IPTEK menjadi masyarakat modern yang menguasai IPTEK. Penguasaan IPTEK akan menjadikan masyarakat lebih mudah untuk mengakses segala masalah yang nantinya dapat diterapkan di wilayah kawasan pariwisata tersebut. Contohnya, tersedianya sarana komunikasi yang memadai, misalnya akses internet yang mudah (akses wifi). Komunikasi sudah mudah dilakukan karena tersedianya peralatan yang memadai, seperti handphone dan internet. Peralatan ini akan lebih mudah digunakan apabila akses internet juga mudah diperoleh. Oleh karena itu, kawasan wisata perlu menyediakan layanan akses internet.

Disamping dampak positif, masih ada aspek-aspek yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki dari adanya pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, yaitu antara lain: **pertama**, terkikisnya nilai budaya akibat rendahnya tingkat pola pikir masyarakat terutama anak muda yang sangat mudah terpengaruh budaya luar. **Kedua**, kerusakan lingkungan dan ekosistem. Pembangunan kawasan wisata Mandalika juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Dampak-dampak yang perlu diperhatikan antara lain pengolahan limbah, pengolahan air bersih, drainase sebagai upaya preventif dalam menanggulangi banjir, *illegal logging* serta menanggulangi permasalahan sampah yang akan terjadi.

Adapun dampak dalam kegiatan pembangunan ekonomi maupun infrastruktur terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dari pembangunan itu sendiri secara keseluruhan pelaku usaha maupun masyarakat setempat menyatakan bahwa pariwisata berdampak terhadap pengembangan masyarakat dalam bidang ekonomi.

Pengaruh yang di rasakan masyarakat dalam hal ekonomi yaitu meningkatnya pendapatan karena berkembangnya pariwisata, sehingga banyak celah untuk mencari pemasukan, seperti merebaknya usaha kuliner, souvenir, tour guide dan lain-lain, sehingga mereka merasa pengaruh yang ditimbulkan dalam aspek ekonomi ini sangat signifikan.

Namun, menurut salah satu informan yang memang berprofesi pada kegiatan pariwisata saat ini rata-rata pendapatan mereka agak menurun karena faktor lain yaitu wabah covid-19 yang membuat kegiatan pariwisata menjadi lesu, sehingga tidak sedikit pengusaha menutup usahanya dan kembali menjadi nelayan, berkebun, buruh serabutan dan pekerja proyek pada pembangunan-pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan Bypass baru.

Sedangkan dampak yang dirasakan dalam bidang sosial budaya mayoritas merasakan perubahan profesi masyarakat setempat serta perubahan gaya hidup yang cenderung mengikuti budaya barat. Serta adanya peralihan profesi yang terjadi dan secara menyeluruh merasakan perubahan yang besar dalam hal penataan ruang dan lingkungan.

Penerapan prinsip blue economy di kawasan KEK ini dalam beberapa aspek bisa dibilang sudah terpenuhi seperti dalam aspek inklusi sosial dan multipalyer effectnya yaitu dengan pelibatan masyarakat setempat dalam proses kegiatan pembangunan yang dilakukan, pemberdayaan masyarakat serta bantuan yang diberikan kepada pelaku usaha pariwisata. Namun, untuk masalah lingkungan masih belum bisa dikatakan sepenuhnya mengaplikasikan prinsip *Blue Economy* yang ramah lingkungan dan *sustainable* dilihat dari berbagai gangguan yang ditimbulkan serta penggunaan lahan dan alam yang berlebihan menimbulkan kerusakan alam.

## 6. KESIMPULAN

### Kesimpulan

1. Pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika yang berbasis *Blue Economy*, masyarakat pada umumnya masih awam akan konsep *Blue Economy*, bahkan para perangkat desa dan pelaku usaha belum pernah mendengar konsep tersebut. Namun dalam aspek pariwisata terdapat berbagai kegiatan-kegiatan yang dijalankan, yaitu sebuah forum yang dibentuk oleh pihak pengelola dengan travel agent, asosiasi hotel, serta stakeholder pariwisata untuk memasarkan produk

kawasan dengan para investor, memberikan informasi menyeluruh terkait pengembangan kawasan yang dikelola, dan pembinaan masyarakat desa penunjang. Selain itu, kegiatan pembangunan-pembangunan hotel berbintang dan infrastruktur secara langsung menyerap tenaga kerja lokal yang terdampak oleh covid-19.

2. Dalam aspek ekonominya sendiri sudah memberikan dampak yang sangat positif bagi pelaku usaha dan masyarakat baik itu dari desa penyangga dan desa Kuta sendiri. Hal tersebut terlihat dari banyaknya lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pihak pengelola dan pemerintah dalam menyerap tenaga kerja ahli dibidangnya serta kreatifitas masyarakat dalam menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, terutama di dalam bidang kepariwisataan.

Namun demikian disegala aspek pembangunan tidak akan pernah luput dengan yang namanya pro-kontra, positif dan negatif. Dimana, tidak sedikit masyarakat yang sadar akan dampak negatif dari pengembangan kegiatan pariwisata, termasuk kerusakan lingkungan. Pembangunan juga didesain sesuai dengan ekosistem bekerja, karena diakui bahwa alam bekerja secara efisien. Prinsip efisiensi sumber daya alam tersebut dianut dalam *Blue Economy*.

Namun, dalam kenyataannya pembangunan yang dilaksanakan masih belum bisa dikatakan sepenuhnya memuat unsur-unsur *Blue Economy* yang mengedepankan prinsip *sustainable* dan ramah lingkungan, karena banyaknya lahan-lahan yang telah rusak sehingga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat setempat. Selain itu, pembangunan Mandalika yang menuai banyak sengketa dengan masyarakat secara fundamental tidak sesuai dengan pembangunan berkelanjutan.

#### **Saran**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sudah cukup baik dalam mensejahterakan masyarakat. Namun perkembangan sumber daya manusia harus terus ditingkatkan sebagai peningkatan perkembangan kedepannya, serta masalah lingkungan dan alam yang harus tetap diperhatikan. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut :

- Pengembangan dokumentasi dan materi *Blue Economy* untuk publik.
- Mengembangkan usaha dan investasi berbasis *Blue Economy*, yang dimulai dari beberapa kegiatan utama seperti budidaya rumput laut, artemia, garam, pakan ikan, dan pengelolaan pulau kecil yang berkelanjutan yang mengantisipasi isu ketahanan energi, pangan, dan air bersih.
- Perlu adanya penghubung antara pihak masyarakat, pemerintah dan pengelola terkait pembangunan dikawasan. Partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan dan evaluasi sebagai modal penting dalam setiap pembangunan. Sehingga tidak ada kesalahan komunikasi dalam menjalankan roda perekonomian disuatu daerah, sumber daya alam dan sumber daya manusia harus dijaga, dirawat, dipelihara sesuai asas-asas pemberdayaan.
- Melakukan upaya pemulihan lingkungan dan ekosistem untuk memulihkan struktur, fungsi, dinamika populasi, serta keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.H. Rahadian.2016. *Development of Marine and Coastal Tourism Based on Blue Economy*, Volume III, No. 01:46-56.
- CNN Indonesia, KEK Mandalika Lombok Tengah diresmikan Presiden Jokowi, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20171021172229-307-249981/kek-mandalika-lombok-diresmikan-presiden-jokowi>.  
Diakses Pada Tgl 30 desember 2020
- Dewan Nasional KEK. Agenda Prioritas. <http://kek.go.id/kek-indonesia>. diakses 20 juli 2021.
- Dimas Tegar R, RO Saut Gurning.2018. *Pengembangan Wisata Bahari dan Pesisir Berdasarkan Ekonomi Biru*, Vol.02: 128-132
- Ekonomi.bisnis.com,kek-mandalika-diyakini-ungkit-pendapatan-ntb, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210922/12/1445516/kek-mandalika-diyakini-ungkit-pendapatan-ntb>. Diakses 28 oktober 2021
- Herie Saksono, 2013. *Ekonomi Biru : Solusi Pembagunan Daerah Berciri Kepulauan Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Anambas* , vol 5 No.1:1-13
- I Nyoman Radiarta, Erlania, dan Joni Haryadi. 2015. *Analisis Pengembangan Perikanan Budidaya Berbasis Ekonomi Biru dengan Pendekatan Analytic Hierarchy Processn (AHP) Approach*, Vol.10 No.1 :47-59
- Ichwan Haryanto. 2015. *Proses Kerjasama Internasional Antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Perancis Utara Dalam Menerapkan Konsep “Blue Economy” di Kawasan Madura Kabupaten Sapeke*, Vol 3 No.1
- ITDC. Tentang Kami. <https://www.itdc.co.id/perusahaan/tentang-kami/>. Diakses Pada Tanggal 02 juli 2021
- Mira, Maulana Firdaus dan Elly Reswati. 2014. *Penerapan Prinsip Blue Economy Pada Masyarakat Pesisir di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah*, Vol. 9 No.1:17-23
- Nicholas Kathijotes. 2013. *Ekonomi Biru - Lingkungan dan Perilaku Aspek Menuju Pembangunan Pesisir Berkelanjutan, Konferensi Internasional AMER Tentang Kualitas Hidup, langkawi, Malaysia*, doi: 10.1016 7 – 13
- Nota Morra Banu Ghalidza, 2020. *Konsep Blue Ekonomi Terhadap Pembangunan Ekonomi di Indonesia*, Vol.22 No.01
- Pambudi Eko W. dan Miyasto. 2013. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan FaktorFaktor Yang Mempengaruhi (Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah).Diponegoro Journal of Economics*, Vol. 2 No. 2: 1-11
- Penerapan konsep ekonomi biru di kuta Mandalika. <https://foto.bisnis.com/view/20180918/839532/javascript>
- Prof. Dr. Sugiono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*; Bandung Alfabeta

---

Rendi Prayuda, Dian Venita Sary. 2019. *Strategi Indonesia dalam Implementasi Konsep Blue Economy terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN*, Vol. 3 No. 2: 46-64.

Sejarah pembangunan kawasan ekonomi khusus. <http://indonesiabaik.id/motion-grafis/sejarah-pembangunan-kawasan-ekonomi-khusus>

Sumarmi, Elya Kurniawati, Muhammad Aliman, 2020. *Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Untuk Membangun Ekonomi Biru dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Untuk Pembangunan Wisata Ikan di Klatak, Tulungagung, Indonesia*, Vol.31(3),979–986. <https://doi.org/10.30892/gtg.31307-530>

Susanto D. 2011. *Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Unggulan dan Kesenjangan Pada Empat Kabupaten di Pulau Madura. Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 9 No. 1:42-62

Sustainable Tourism in the Nature and National Parks of Europe John Anfield, The George Wright Forum Vol. 10, No. 4 (1993), pp. 87-94 (8 pages)  
Published By: George Wright Society